

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses perencanaan ADD telah dilakukan dari tingkat bawah sampai dengan desa, yaitu dimulai dari musrenbangdes dan musrenbangdes. Kegiatan perencanaan masih didominasi pada kegiatan fisik, mengingat kondisi desa relatif rusak dan membutuhkan percepatan perbaikan.
2. Perencanaan ADD yang sudah dibuat ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pelaksana ADD. Tim ini dibentuk melalui musrenbangdes yang diisi oleh tokoh pemerintah desa, BPD dan tokoh lembaga tingkat desa lainnya. Tim inilah yang nantinya akan mengelola seluruh dana ADD.
3. Pelaksanaan ADD secara umum sesuai rencana, namun demikian kemampuan SDM pengelola terkadang sulit menyelesaikan administrasi tepat waktu. Pelaksanaan ADD didukung oleh masyarakat sekitar, terutama membantu tenaga dan bantuan dana.
4. Fungsi pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan dengan tiga elemen, yaitu tim pengelolaa itu sendiri, pengawasan dari kecamatan/kabupaten dan juga masyarakat. Sistem pengawasan seringkali hanya terpusat pada laporan kegiatan secara tertulis, dan kurang diimbangi dengan pemeriksaan teknis secara faktual.

#### **B. Implikasi**

1. Perencanaan partisipatif perlu terus ditekankan kepada semua komponen masyarakat, sehingga perencanaan ADD akan lebih matang mulai dari tingkat bawah yang diteruskan pada tingkat desa. Perencanaan partisipatif akan membuahkan perencanaan yang sesuai dengan permasalahan riil masyarakat, yang pada akhirnya dapat diselesaikan dengan stimulan dari ADD.

2. Rencana ADD perlu didukung dengan SDM yang handal, dengan harapan rencana ADD benar-benar sesuai kebutuhan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Karena itulah pengorganisasian yang dilakukan oleh tim perlu didukung oleh semua komponen yang ada di desa, baik dalam merekrut tokoh masyarakat yang berkompeten untuk dilibatkan secara langsung dalam semua tahapan ADD.
3. Kualitas SDM pelaksana yang relatif sedang menjadi permasalahan tersendiri. Pelaksanaan ADD yang harus diimbangi dengan pembuatan laporan perlu menjadi perhatian tim pelaksana. Berkas laporan yang cukup banyak, seringkali menyulitkan tim untuk membuat laporan. Karenanya peran pendamping perlu diintensifkan lagi, terutama pada saat kegiatan sudah mulai dilaksanakan sampai dengan kegiatan selesai, sehingga diharapkan pelaksana dapat terus belajar guna efektivitas pengelolaan ADD di masa mendatang.
4. Pengelolaan dana publik perlu diimbangi dengan akuntabilitas sehingga dapat diketahui oleh masyarakat desa. Karenanya perkembangan dana ADD hendaknya dilaporkan secara periodik secara konsisten, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal terkait dengan realisasi dana serta kegiatan yang telah dilaksanakan. Karena itulah BPD dan masyarakat hendaknya lebih aktif dengan memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian rencana dengan realisasi sehingga hasil dari ADD akan lebih optimal.